



PENGARUH LIKUIDITAS, *LEVERAGE*, DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR *FOOD AND BEVERAGES* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020 – 2023

SKRIPSI

Oleh:
SELLYN SEPTIANTY
20210100036

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN & PERPAJAKAN

FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2025



PENGARUH LIKUIDITAS, *LEVERAGE*, DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR *FOOD AND BEVERAGES* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020 – 2023

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Oleh:
SELLYN SEPTIANTY
20210100036**

**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2025

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sellyn Septianty
NIM : 20210100036
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverages* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 02 Oktober 2024

Menyetujui,

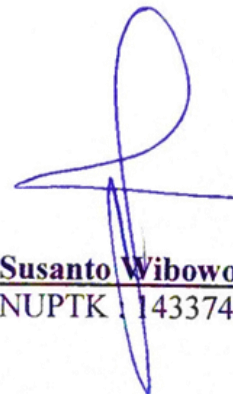
Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Sutandi, S.E., M.Akt.
NUPTK : 5956756657130122



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NUPTK : 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverages* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Sellyn Septianty

NIM : 20210100036

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 18 Desember 2024

Menyetujui,

Pembimbing,

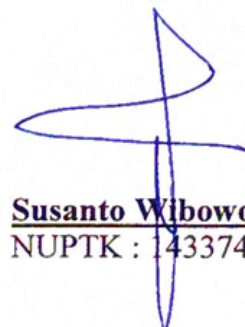
Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Sutandi, S.E., M.Akt.

NUPTK : 5956756657130122



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.

NUPTK : 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutandi, S.E., M.Akt.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Sellyn Septianty

NIM : 20210100036

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverages* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)

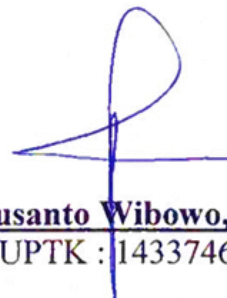
Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing,



Sutandi, S.E., M.Akt.
NUPTK : 5956756657130122

Tangerang, 18 Desember 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NUPTK : 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Sellyn Septianty
NIM : 20210100036
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverages* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NUP : 9990066602



Penguji I : Rina Aprilvanti, S.E., M.Akt.
NUPTK : 4740764665230302



Penguji II : Rininta Parameswari, S.Pd., M.Si.
NUPTK : 3535758659230153



Dekan Fakultas Bisnis,



Rr Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NUPTK : 9759751652230072



**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Di buat oleh,

NIM : 20210100036
Nama : Sellyn Septianty
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: "**Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023**", beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 16 Maret 2025



Peneliti
Sellyn Septianty

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 03 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Sellyn Septianty

20210100036

**PENGARUH LIKUIDITAS, *LEVERAGE*, DAN *CAPITAL INTENSITY*
TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
SUB SEKTOR *FOOD AND BEVERAGES* YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2023**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh likuiditas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2023. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu likuiditas, *leverage*, dan *capital intensity*. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *tax avoidance*.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 13 perusahaan yang termasuk dalam kriteria tertentu selama periode 2020-2023 dengan 4 tahun pengamatan berturut-turut sehingga total sampel sebanyak 52. Teknik analisis data berupa uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji statistik (uji regresi linear berganda dan uji koefisien determinasi r^2), uji hipotesis (uji signifikansi simultan dan uji signifikansi parameter individual). Data penelitian ini menggunakan IBM SPSS *Statistics* versi 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas memiliki nilai sebesar $0,821 > 0,05$. *Leverage* memiliki nilai $0,001 < 0,05$. *Capital Intensity* memiliki nilai $0,256 > 0,05$. Secara bersamaan Likuiditas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diartikan bahwa: 1. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, 2. *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, 3. *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, 4. Likuiditas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: Likuiditas, *Leverage*, *Capital Intensity*, *Tax Avoidance*.

***THE EFFECT OF LIQUIDITY, LEVERAGE, AND CAPITAL INTENSITY
ON TAX AVOIDANCE IN MANUFACTURING COMPANIES IN THE
FOOD AND BEVERAGES SUB-SECTOR LISTED ON THE INDONESIA
STOCK EXCHANGE IN 2020-2023***

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence on the effect of liquidity, leverage, and capital intensity on tax avoidance in manufacturing companies in the food and beverages sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020-2023 period. The independent variables in this study are liquidity, leverage, and capital intensity. The dependent variable in this study is tax avoidance.

The study uses quantitative data, and secondary data from the company's financial statements. The sampel determination was carried out using the purposive sampling method with a sample of 13 companies included in certain criteria during the 2020-2023 period with 4 consecutive years of observation so that the total sample was 52. Data analysis techniques were in the form of descriptive statistical tests, classical assumption tests, normality tests, multicollinearity tests, heteroscedasticity tests, autocorrelation tests, statistical tests (multiple linear regression tests and r^2 determination coefficient tests), hypothesis tests (simultaneous significance tests and individual parameter significance tests). The data of this study uses IBM SPSS Statistics Version 25.

The results of the research conducted showed that liquidity has a value of $0.821 > 0.05$. Leverage has a value of $0.001 < 0.05$. Capital Intensity has a value of $0.256 > 0.05$. Simultaneously, liquidity, leverage, and capital intensity have a significant value of $0.000 < 0.05$.

Based on the results of the above research, it can be interpreted that: 1. Liquidity has no effect on tax avoidance, 2. Leverage has an effect on tax avoidance, 3. Capital Intensity has no effect on tax avoidance, 4. Liquidity, Leverage, and Capital Intensity simultaneously affect tax avoidance.

Keywords: *Liquidity, Leverage, Capital Intensity, Tax Avoidance.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun judul skripsi ini ialah **“Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverages* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023)”**, penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Buddhi Dharma.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang dengan tulus membantu selama proses penyusunan berlangsung. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Buddhi Dharma.
4. Bapak Sutandi, S.E., M.Akt., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat pada waktunya.
5. Seluruh Dosen Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan ilmu pengetahuan, nilai-nilai positif, dan selalu memberikan motivasi dan semangat

selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Buddhi Dharma.

6. Keluarga serta saudara yang telah mendoakan serta mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Seluruh sahabat dan teman-teman khususnya Yunita Asri, Yunita, dan Sunny Kulimno yang telah menemani dan berbagi ilmu selama kuliah di Universitas Buddhi Dharma juga selalu membantu penulis memberikan saran dan dukungan hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Kepada Ekklesia dan Angellica Octaviani Wijaya Kusumo yang telah menghibur, memotivasi, dan memberi semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik dan sempurna. Penulis berharap agar skripsi ini berguna bagi para pembaca dan bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

Tangerang, 01 Januari 2025

Penulis,

Sellyn Septianty

NIM : 20210100036

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Gambaran Umum Teori.....	12
1. Pajak.....	12
2. Likuiditas.....	20

3. <i>Leverage</i>	24
4. <i>Capital Intensity</i>	29
5. <i>Tax Avoidance</i>	31
B. Hasil Penelitian Terdahulu	38
C. Kerangka Pemikiran	46
D. Perumusan Hipotesis	47
1. Pengaruh <i>Likuiditas</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	47
2. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	48
3. Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	48
4. Pengaruh <i>Likuiditas, Leverage, dan Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Objek Penelitian	52
C. Jenis dan Sumber Data	53
D. Populasi dan Sampel	54
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian	57
G. Teknik Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian	71
1. <i>Tax Avoidance</i>	71
2. <i>Likuiditas</i>	74
3. <i>Leverage</i>	76
4. <i>Capital Intensity</i>	77
B. Analisis Data Hasil Penelitian	79
1. Uji Statistik Deskriptif	80
2. Uji Asumsi Klasik	81
C. Pengujian Hipotesis	87
1. Uji Koefisien Determinasi R^2	87
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	88

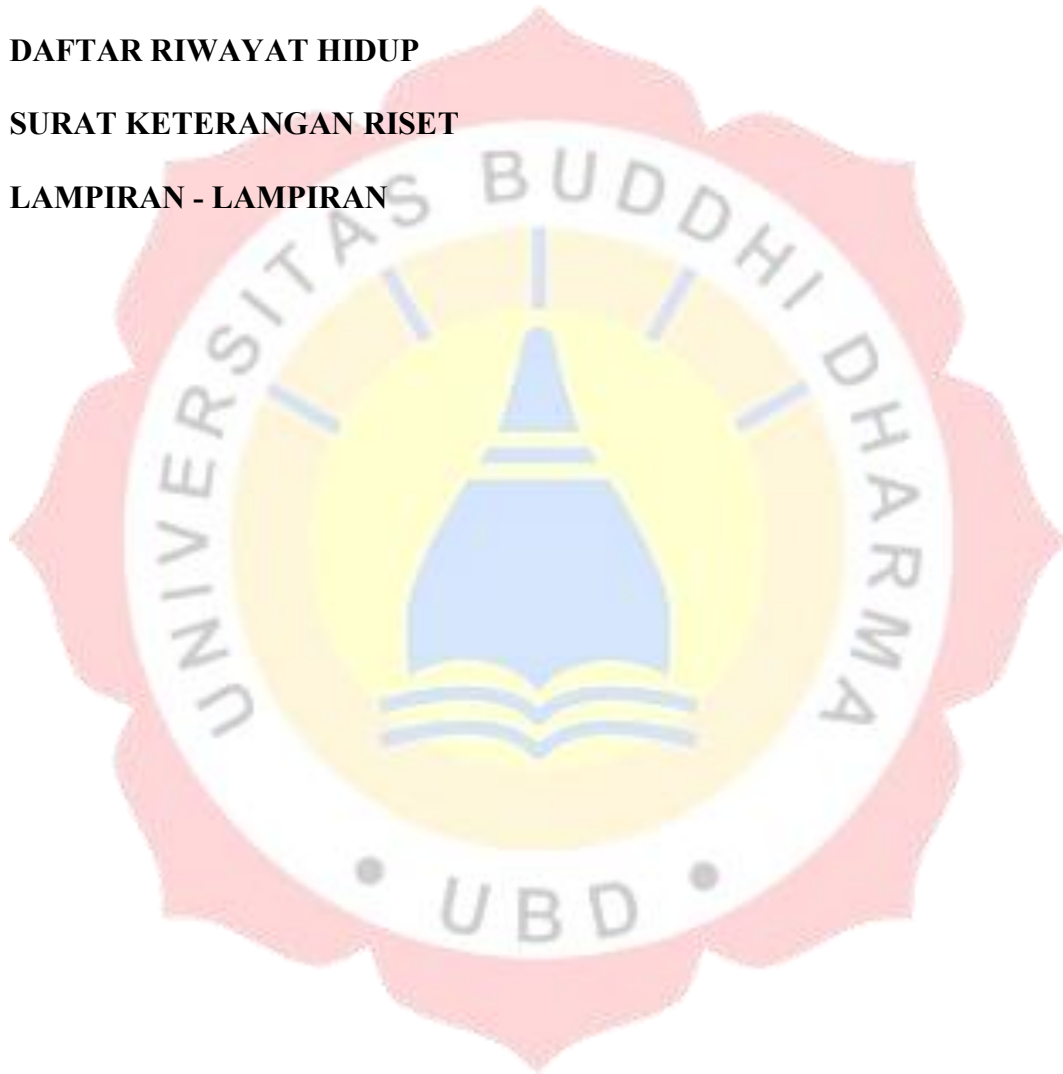
3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	90
D. Pembahasan.....	94
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN RISET

LAMPIRAN - LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II. 1 Daftar Kasus <i>Tax Avoidance</i>	34
Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel III. 1 Penentuan Jumlah Sampel Penelitian	56
Tabel III. 2 Daftar Nama Perusahaan.....	57
Tabel III. 3 Operasional Variabel.....	61
Tabel IV. 1 Hasil Perhitungan <i>Tax Avoidance</i>	72
Tabel IV. 2 Hasil Perhitungan Likuiditas	74
Tabel IV. 3 Hasil Perhitungan <i>Leverage</i>	76
Tabel IV. 4 Hasil Perhitungan <i>Capital Intensity</i>	78
Tabel IV. 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	80
Tabel IV. 6 Hasil Uji Normalitas	81
Tabel IV. 7 Hasil Uji Multikolinieritas	82
Tabel IV. 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	83
Tabel IV. 9 Hasil Uji Auto Korelasi	84
Tabel IV. 10 Hasil Analisis Regresi Berganda	85
Tabel IV. 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	87
Tabel IV. 12 Hasil Uji Statistik F.....	89
Tabel IV. 13 Hasil Uji Statistik t.....	91

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II. 1	Kerangka Penelitian.....	47
--------------	--------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	Daftar Nama Perusahaan Yang Menjadi Sampel Perusahaan	111
Lampiran 2	Perusahaan Yang Tidak Menyajikan Lap. Keu Secara Lengkap ..	112
Lampiran 3	Perusahaan Yang Mengalami Keerugian	114
Lampiran 4	Perusahaan Yang Tidak Menggunakan Mata Uang Rupiah.....	115
Lampiran 5	Perusahaan Yang Tidak Membagikan Deviden	115
Lampiran 6	Perusahaan Yang Tidak Lulus Uji Outlier	116
Lampiran 7	Laporan Keuangan Periode 2020	117
Lampiran 8	Laporan Keuangan Periode 2021	120
Lampiran 9	Laporan Keuangan Periode 2022	123
Lampiran 10	Laporan Keuangan Periode 2023	126
Lampiran 11	Hasil Perhitungan Likuiditas	129
Lampiran 12	Hasil Perhitungan <i>Leverage</i>	131
Lampiran 13	Hasil Perhitungan <i>Capital Intensity</i>	133
Lampiran 14	Hasil Perhitungan <i>Tax Avoidance</i>	135
Lampiran 15	Hasil Uji Statistik Deskriptif	136
Lampiran 16	Hasil Uji Normalitas	137
Lampiran 17	Hasil Uji Multikolinieritas.....	137
Lampiran 18	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	138
Lampiran 19	Hasil Uji Autokorelasi	138
Lampiran 20	Hasil Uji Analisis Regresi Berganda.....	139
Lampiran 21	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	139
Lampiran 22	Hasil Uji F	139
Lampiran 23	Hasil Uji T	140
Lampiran 24	Tabel Persentase Distribusi t	140
Lampiran 25	Tabel Persentase Distribusi F	141
Lampiran 26	Tabel Durbin Watson.....	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang, pemerintahan akan terus melakukan pembangunan di segala bidang untuk menjaga kesejahteraan seluruh rakyatnya. Untuk mencapai kesejahteraan nasional, pembangunan tersebut tentu akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pembangunan negara tidak akan tercapai jika negara tidak memiliki sumber pendapatan yang besar. Sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak.

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan negara, oleh karena itu pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Pajak sebagai penyumbang tertinggi dalam penerimaan negara untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak terus meningkat, sedangkan disisi lain penghindaran atas pajak dilakukan oleh wajib pajak supaya tidak mengurangi penghasilan yang diterimanya (Safitri & Wahyudi, 2022). Bagi wajib pajak, pajak yang dibayarkan merupakan biaya yang dapat mengurangi pendapatan bersih, sedangkan bagi pemerintah pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional. Akibat dari ketidaksejajaran tujuan tersebut, wajib pajak cenderung melakukan upaya untuk meminimalkan biaya pajak dengan melakukan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. *Tax avoidance* yang merupakan suatu usaha untuk mengurangi tarif pembayaran

pajak. Namun, tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan kasus-kasus khusus yang dapat menjadi alasan untuk menunda pemungutan pajak yang belum diatur atau dikelola dengan semestinya dalam undang-undang yang berlaku. Permasalahan tindakan *tax avoidance* ini merupakan masalah yang rumit dan unik karena dalam hal ini *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal). Akan tetapi, disisi lain tindakan *tax avoidance* ini tidak diharapkan oleh pemerintah. Peluang terjadinya *tax avoidance* ini disebabkan oleh pemerintah di karenakan mengadopsi sistem *self-assessment* dimana wajib pajak diberikan kebebasan penuh dalam menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Penerapan perpajakan ini seolah membuka peluang bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Ida Ayu Putu Wira Yanti and I Nyoman Putra Yasa, 2022).

Adapun fenomena *tax avoidance* dalam kasus perusahaan *property* dan *real estate* di Indonesia adalah transaksi properti yang dilakukan oleh pengembang Perumahan Bukit Semarang baru yang dikembangkan oleh PT. Karyadeka Alam Sari, termasuk penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun, hanya tertulis Rp 940 juta di akta notaris. Ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan harga sebesar Rp 6,1 miliar. Terdapat potensi pajak pertambahan nilai (PPN) yang harus disetor sebesar sepuluh persen dari transaksi ini dikalikan dengan Rp 6,1 miliar atau Rp 610 juta. Selain itu, ada pajak penghasilan tambahan (PPh) final sebesar lima persen dikalikan dengan Rp 6,1 miliar atau Rp 300 juta. Dengan demikian, kekurangan pajak total

sebesar Rp 910 juta. Apabila transaksi tersebut banyak terjadi maka negara dapat mengalami kerugian pendapatan pada pajaknya.

Terdapat fenomena lain dalam *tax avoidance* yaitu yang dimana dilaporkan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenku) tentang laporan keadilan pajak jaringan. Menurut laporan ini, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 68,7 triliun sebagai akibat dari penghindaran pajak korporasi yang ada di Indonesia serta pajak sebesar Rp 1,1 triliun yang berasal dari wajib pajak orang pribadi. Menurut *Tax Justice Network*, perusahaan multinasional memindahkan keuntungan mereka ke negara-negara dengan pajak yang lebih rendah, yang mengakibatkan pembayaran pajak yang lebih rendah bagi perusahaan. Untuk menghindari pencatatan di luar negeri, wajib pajak individu menghindari aset dan pendapatan yang dimiliki agar tidak dicatat di dalam negeri.

Terdapat fenomena lain dalam *tax avoidance* yaitu Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik PT British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak di Indonesia sehingga mengalami kerugian US\$ 14 juta persaham. Dalam laporan *Tax Justice Network* melaporkan bahwa BAT mengalihkan sebagian pendapatannya keluar negeri yaitu melalui pinjaman PT Bentoel Internasional Investama dengan cara membayar bunga pinjaman dan royalti keluar negeri.

Perusahaan dapat dihitung dari laba bersihnya sebagai salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan. Semakin banyak pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan, maka semakin banyak pendapatan negara

yang meningkat. Sebaliknya, beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan mengurangi laba bersihnya. Tujuan perusahaan sebagai wajib pajak bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak, yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak dan dengan demikian menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, tujuan perusahaan sebagai wajib pajak adalah untuk kemakmuran pemilik dan kelangsungan hidup perusahaan (Hidayatul Aini & Andi Kartika, 2022).

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu likuiditas, dimana likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang dalam jangka pendek. Likuiditas dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Tingkat likuiditas yang tinggi akan dinilai sehingga menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, sebaliknya apabila tingkat likuiditas rendah maka kinerja perusahaan akan dinilai buruk. Tingkat likuiditas yang tinggi akan mempermudah perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan karena adanya kepercayaan yang tinggi dari para *stakeholder* (Arkana & Widijoko, 2023). Likuiditas dijadikan sebagai pengukuran atas mampu atau tidaknya perusahaan dalam melunasi kewajiban yang dimiliki baik yang segera atau sudah jatuh tempo. Dapat dikatakan bahwa perhitungan likuiditas dapat digunakan perusahaan sebagai pertimbangan kemampuan perusahaan tersebut dalam mengelola aktiva lancarnya untuk melakukan pembayaran hutang jangka pendek yang dimiliki. Kemampuan perusahaan dalam melakukan pelunasan atas semua hutangnya dapat dilihat dari arus kas perusahaan tersebut. Apabila arus kas perusahaan baik maka

semua kewajiban yang dimiliki akan dibayar dan dilunasi dengan baik pula. Selain itu, arus kas yang baik juga akan menunjukkan bahwa suatu perusahaan dapat melakukan pembayaran pajak berdasarkan aturan yang berlaku. Jika arus kas badan usaha buruk atau likuiditasnya rendah, perusahaan tersebut akan lebih mengutamakan pembayaran kewajibannya dibandingkan membayar pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kemungkinan sebuah badan usaha untuk menghindari pajak meningkat seiring dengan tingkat likuiditas badan usaha (Rindu & Junianto, 2023). Peneliti terdahulu menurut (Muthmainah & Hermanto, 2023), likuiditas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan menurut (Anggara et al., 2023), likuiditas berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi Penghindaran Pajak adalah *leverage*, merupakan rasio yang menunjukkan jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aset tetapnya. Penambahan hutang akan menyebabkan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Sebagian dari beban bunga akan mengurangi laba perusahaan sebelum kena pajak, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan berkurang (Kalbuana et al., 2020). Perusahaan harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat digunakan untuk membayar utang karena menggunakan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskannya. Dalam hal ini manajemen mungkin cenderung meningkatkan *leverage* perusahaan untuk mendanai ekspansi proyek yang dapat

meningkatkan kekuasaan atau kontrol mereka dalam perusahaan. Sehingga dapat menyebabkan terjadinya konflik agensi antara kepentingan manajemen untuk memperluas pengaruh atau kontrol mereka dan kepentingan utama pemegang saham, yaitu memperoleh keuntungan maksimal dengan mengelola risiko secara hati-hati dan efisien demi meningkatkan nilai perusahaan. Peneliti terdahulu menurut (Agustina et al., 2023), *leverage* berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan menurut (Febrilyantri, 2022), *leverage* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Faktor terakhir yang mempengaruhi Penghindaran Pajak yaitu *Capital Intensity* merupakan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan dapat diukur dengan investasi aset tetap. Penyusutan dapat terjadi pada hampir semua aset, dan biaya yang terkait dengan penyusutan tersebut dapat mengurangi jumlah pembayaran pajak negara (Malik et al., 2022). *Capital Intensity* menggambarkan besarnya modal perusahaan yang dibutuhkan dalam usahanya untuk memperoleh pendapatan dari penurunan atau peningkatan aktiva tetap. Perusahaan dengan investasi dalam bentuk aset tetap dapat memanfaatkan biaya depresiasi sebagai usahanya dalam penurusan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Sebagian besar aset tetap akan mengalami penurunan nilai atau penyusutan yang bila timbulnya biaya tersebut dapat mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Adanya biaya depresiasi aset tetap dapat menjadi penambah beban perusahaan sehingga menurunkan

laba yang didapatkan oleh perusahaan. Bila hal tersebut terjadi, maka dasar perhitungan pajak akan semakin mengecil karena menurunnya laba perusahaan (Josafat & Febrianti, 2023). Penelitian terdahulu menurut (Rahma et al., 2022), *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan menurut (Dewi & Oktaviani, 2021), *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

- a. *Tax avoidance* yang digunakan untuk mengetahui banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.
- b. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau mengubah laba sehingga tampak kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
- c. Penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal. Kegiatan ini menimbulkan risiko bagi perusahaan diantaranya ialah denda dan reputasi yang buruk di mata publik serta mengurangi kas negara.
- d. Pengukuran perusahaan yang terbilang besar masih banyak perusahaan yang melakukan *tax avoidance*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverage* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2023?
- b. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverage* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2023?
- c. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverage* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2023?
- d. Apakah Likuiditas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverage* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2023?

D. Tujuan Penelitian

Dalam masalah penelitian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverage* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2023.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverage* Yang Terdaftar di

Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2023.

- c. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverage* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2023.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverage* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2023.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka penulis mengharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya pada isu yang terkait dengan *tax avoidance*.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi dalam penelitian ilmu pengetahuan tentang Likuiditas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian terkait penentuan perusahaan untuk menghindari pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai literatur atau referensi untuk pengembangan. Peneliti berharap dapat menambah ilmu perpajakan terutama yang berkaitan dengan pengaruh Likuiditas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

F. Sistematika Penulisan

Tujuan dari penyusunan sistematis dalam penulisan adalah untuk mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini, penulis mencantumkan sistematika penulisan yang diantaranya terdiri dari 5 (lima) bab diantaranya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab dua berisi gambaran umum yang menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian pada variabel independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesa.

BAB III METODE PENELITIAN

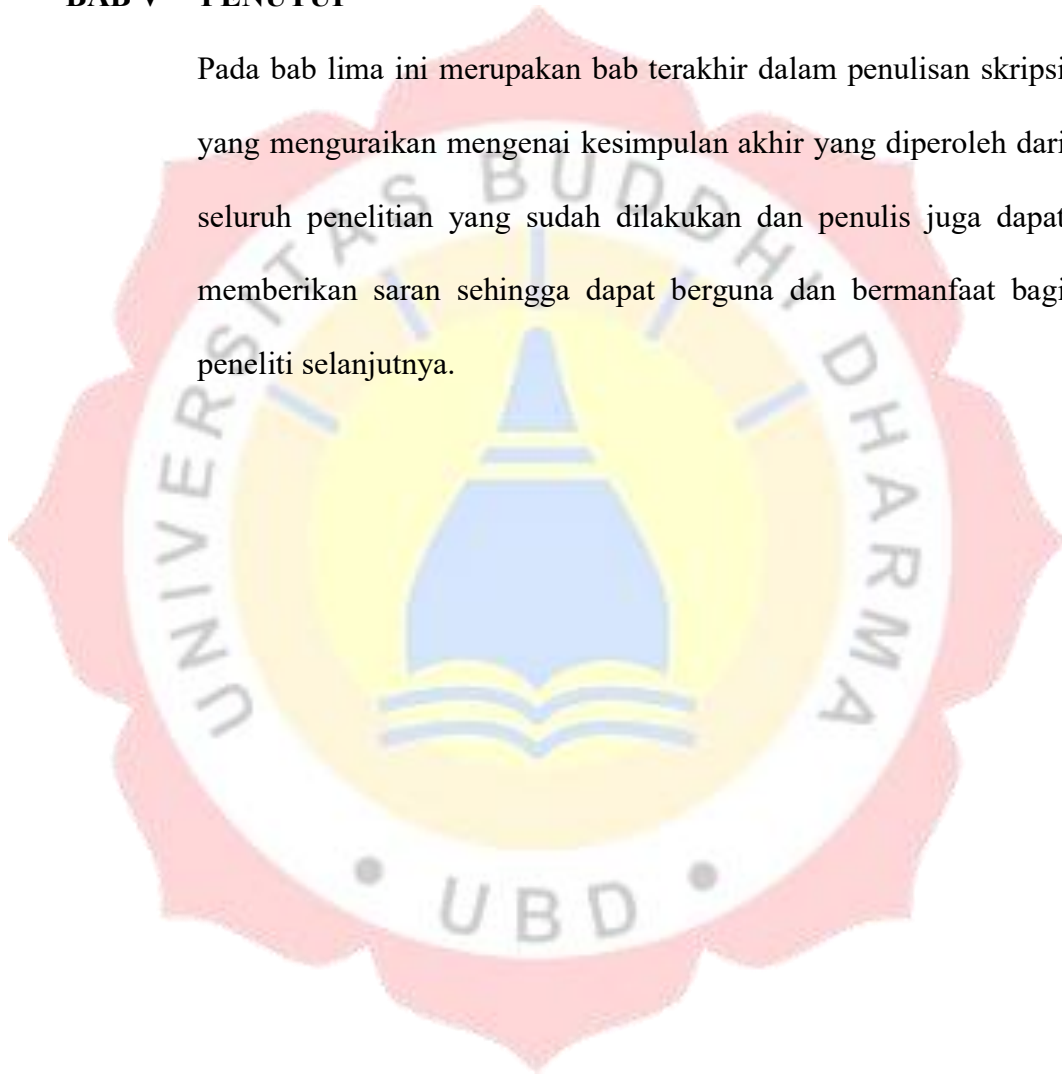
Bab tiga berisikan jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik dan pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat membahas tentang deskripsi data hasil penelitian variabel independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab lima ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang menguraikan mengenai kesimpulan akhir yang diperoleh dari seluruh penelitian yang sudah dilakukan dan penulis juga dapat memberikan saran sehingga dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2017 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi finansial yang bersifat memaksa dari individu atau entitas hukum kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran publik guna meningkatkan taraf hidup masyarakat”.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya dalam buku Sihombing & Sibagariang, (2020, 1) mengatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh warga atau masyarakat, baik dalam bentuk uang maupun barang yang dipungut oleh penguasa sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan jasa demi kesejahteraan umum.”

Menurut (Yulawati & Sutrisno, 2021) mengatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh pribadi maupun badan, bersifat memaksakan dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak digunakan untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan rakyat Indonesia”.

Menurut Dwi Sunar Prasetyono dalam buku Jalil et al., (2024, 1) mengatakan bahwa:

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional”.

Penulis menyimpulkan dari beberapa definisi para ahli di atas bahwa pajak adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh masyarakat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tidak akan kembali secara langsung kepada individu yang membayarnya. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan negara, pajak memainkan peran penting dalam realisasi pendapatan negara. Untuk kepentingan negara, pajak merupakan sumber terbesar yang diperoleh negara dari kontribusi para wajib pajak. Pemerintah melakukan pembangunan disegala bidang dalam upaya memenuhi kepentingan negara. Pembangunan ini adalah sebagai contoh upaya pemerintah untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kemakmuran rakyat. Perusahaan sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh negara dan masyarakat karena telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk penerimaan pajak negara selama ini. Karena perusahaan harus membayar pajak kepada negara, kepuasan dalam memaksimalkan laba perusahaan berkurang. Dalam situasi seperti ini konflik kepentingan antara negara dan perusahaan. Meskipun pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Dan merupakan

kewajiban negara, perusahaan melihat pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih. Perusahaan biasanya mencari cara untuk mengurangi pembayaran pajak secara legal atau ilegal karena tujuan mereka adalah memaksimalkan laba (Rumbi & Pontoh, 2024).

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran krusial dalam pembangunan negara, berfungsi sebagai sumber dana utama untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan demikian, pajak memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak menghasilkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan negara atau pengeluaran lainnya. Oleh karena itu, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk menerapkan atau mengatur kebijakan sosial dan ekonomi negara. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti: pajak ekspor barang.

- c. Pajak dapat memberikan proteksi atau melindungi produk domestik yang diproduksi, seperti: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang dapat meningkatkan tingkat produksi ekonomi.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak distribusi adalah jenis pajak yang dapat digunakan untuk mengatur dan menyeimbangkan antara distribusi pendapatan dengan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan ekonomi, seperti dengan menetapkan pajak yang tinggi untuk mengurangi inflasi dan menurunkan uang beredar untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, dan menurunkan pajak untuk meningkatkan uang beredar dan mengatasi deflasi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak di beberapa negara terdapat beberapa sistem yang digunakan dan setiap negara tidak sama dalam menerapkan sistem yang digunakan. Menurut Harjo et al., (2023, 2) sistem pemotongan dan pemungutan pajak yang berlaku hingga saat ini terdiri dari tiga macam sistem, antara lain:

1. *Official Assesment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak, dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparatur pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparatur pajak.

2. *Self Assesment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri pajaknya. fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terhutang kecuali wajib pajak menyalahi aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak.

3. *Withholding Assesment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada wajib pajak. Dalam hal ini sistem pemungutan pajak memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh negara Indonesia adalah sistem pemungutan pajak *self assesment system*, yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak.

d. Asas - Asas Pemungutan Pajak

Menurut Jalil et al., (2024, 10) asas pemungutan pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggalnya. Wajib pajak yang tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh baik dalam negeri maupun luar negeri.

2. Asas Sumber

Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayahnya, tanpa memandang tempat tinggal wajib pajak. wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia akan dikenakan pajak di Indonesia, terlepas dari lokasi tempat tinggalnya.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

e. Pengelompokan Pajak

Menurut Jalil et al., (2024, 8) ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari wajib pajak atau masyarakat yang digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungutan dan objek pajak serta subjek pajak. Berikut jenis-jenis pajak sesuai kelompoknya:

1. Jenis pajak berdasarkan golongan dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung:
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya: pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dialihkan beban pembayarannya kepada pihak lain. Contohnya: pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).
2. Jenis pajak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua yaitu subjektif dan objektif:
 - a. Pajak subjektif adalah pajak yang ditentukan berdasarkan subjeknya, yaitu dengan mempertimbangkan kondisi pribadi wajib pajak. Contohnya: pajak penghasilan.
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang ditentukan berdasarkan objeknya, tanpa mempertimbangkan kondisi pribadi wajib pajak. Contohnya: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah:

a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Contohnya: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai.

b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Contohnya:

pajak provinsi (seperti pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar kendaraan bermotor), dan pajak kabupaten/kota (seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan).

f. Bentuk perlawanan

Penyelewengan atau pelanggaran merupakan suatu bentuk dari perlawanan pajak menurut Kusumowardhani, (2022, 6) sebagai berikut:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif mencakup hambatan-hambatan yang terkait erat dengan struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral masyarakat, serta sistem pemungutan pajak itu sendiri.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif merupakan usaha atau perbuatan nyata yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan terhadap pemungut pajak

(Fiskus) dan bertujuan untuk menghindari pajak. Usaha-usaha yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Menghindari pajak merupakan usaha atau perbuatan yang secara sadar tidak melakukan hal-hal yang dikenakan pajak. Usaha ini dilakukan dengan penahanan diri atau mengurangi dan menekan konsumsinya terhadap barang-barang yang kena pajak.
- b. Melalaikan pajak merupakan usaha untuk menolak membayar pajak yang ditetapkan sebagai wajib pajak.
- c. Mengelak atau menyelundupkan pajak merupakan suatu bentuk perbuatan pura-pura (simulasi) dimana wajib pajak secara sadar menyembunyikan keadaan yang sebenarnya terjadi seperti memberikan data yang tidak benar.

2. Likuiditas

Salah satu aspek keuangan yang penting untuk dianalisis adalah rasio likuiditas, karena likuiditas merupakan indikator penting untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Menurut Hutabarat, (2023, 15) mengemukakan bahwa:

“Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu organisasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, terutama dalam hal kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek tepat waktu. Dengan demikian, rasio ini mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya”.

Menurut (Fitriana, 2024, 25) mengemukakan bahwa:

“Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Dengan kata lain, jika perusahaan ditagih, perusahaan tersebut mampu membayar utang tersebut, khususnya yang sudah jatuh tempo”.

Menurut (Sidauruk et al., 2024) mengemukakan bahwa :

“Rasio likuiditas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam menanggung kewajiban keuangan jangka pendeknya dapat diukur dari kemampuannya menggunakan aset yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang kas. Aset yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang kas dikenal sebagai aset likuid. Keberadaan aset likuid jangka pendek yang memadai memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat melunasi kewajiban jangka pendeknya, mengurangi risiko yang mungkin timbul”.

Dari beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan pengertian likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar sedemikian besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi.

Likuiditas dapat diukur dengan aset lancar perusahaan dibandingkan dengan kewajiban lancarnya, merupakan kriteria kesanggupan perusahaan untuk menangani kewajiban jangka pendeknya. Kesanggupan perusahaan dalam menangani kewajiban jangka pendek ditunjukkan oleh rasio likuiditasnya, yang juga menunjukkan kesehatan keuangannya dan kemampuannya untuk menjual aset dengan cepat pada saat dibutuhkan (Fatikha & Furqon, 2024).

Analisis rasio likuiditas memberikan manfaat bagi berbagai pihak, mulai dari pemilik perusahaan hingga kreditor. Informasi ini berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Berikut tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas (Fitriana, 2024, 26):

1. Analisis ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi ini mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan seluruh aset yang mudah dikonversi menjadi kas dalam waktu singkat.
3. Analisis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang sangat likuid, yaitu aset yang dapat segera dikomersi menjadi kas.
4. Mengukur atau membandingkan jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan dengan modal kerja yang tersedia.
5. Mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan untuk masa depan, khususnya dalam perencanaan kas dan kewajiban utang perusahaan.
7. Melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan rasio likuiditas pada berbagai periode.
8. Mengidentifikasi kelemahan yang ada pada perusahaan, dengan menganalisis komponen-komponen dalam aktiva lancar dan kewajiban lancar.
9. Sebagai alat untuk memotivasi manajemen agar memperbaiki, kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas terbaru. Bagi pihak luar perusahaan, seperti penyandang dana, rasio ini juga penting untuk menilai kondisi perusahaan.

Dilihat dari tujuan penganalisa secara umum, berikut ini macam-macam analisa rasio likuiditas yaitu terbagi menjadi tiga rasio, diantaranya rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), dan juga rasio kas (*cash ratio*). Berikut penjelasan dari ketiga rasio ini yaitu:

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Menurut Hutabarat, (2023, 18) *current ratio* merupakan:

“Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.”

Berikut rumus dari rasio lancar:

$$\text{Rasio Lancar (CR)} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

Sumber: Hutabarat, (2023, 18)

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Menurut Hutabarat, (2023, 19) *quick ratio* merupakan:

“Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (*inventory*).”

Berikut rumus dari rasio cepat:

$$\text{Rasio Cepat (QR)} = \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

Sumber: Hutabarat, (2023, 19)

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Menurut Hutabarat, (2023, 19) *cash ratio* merupakan:

“Rasio yang menunjukkan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank.”

Berikut rumus dari rasio kas:

$$\text{Rasio Kas (CHR)} = \frac{(\text{Kas} + \text{Surat Berharga} / \text{Bank})}{\text{Utang Lancar}}$$

Sumber: Hutabarat, (2023, 19)

Dalam penelitian ini likuiditas akan diproksikan dengan *Current Ratio* (Rasio Lancar). Rasio lancar menunjukkan bagaimana jumlah kas yang dimiliki oleh bisnis selama periode akuntansi tertentu dihubungkan dengan hutang jangka pendek yang telah jatuh tempo. Informasi ini dapat ditemukan dalam laporan posisi keuangan. Rasio lancar yang tinggi menunjukkan bahwa suatu perusahaan dapat membayar utangnya saat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa bisnis berada dalam kondisi yang sehat serta tidak mengalami masalah arus kas, sehingga memungkinkan untuk menutupi pengeluaran tak terduga seperti pajak. Dari hasil pengukuran, apabila rasio rendah dapat dikatakan bahwa perusahaan kekurangan modal untuk membayar utang. Namun apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu juga perusahaan dalam kondisi baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak dipergunakan sebaik mungkin (Fatikha & Furqon, 2024).

3. *Leverage*

Leverage juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, semakin rendah semakin rendah tingkat *leverage*

perusahaan, semakin rendah pula tingkat utangnya, yang berarti perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang untuk membiayai asetnya. Oleh karena itu, semakin rendah *leverage* perusahaan, hal ini dapat mempengaruhi manajer untuk menghindari praktik penghindaran pajak. Berikut definisi *leverage* sebagai berikut:

Menurut (Fransisca & Parameswari, 2022) mendefinisikan bahwa:

“*Leverage* adalah rasio keuangan yang mengukur tingkat pengelolaan sumber dana perusahaan untuk melunasi kewajibannya.”

Menurut (Gultom, 2021) mendefinisikan bahwa:

“*Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan membiayai asetnya dengan utang. Ini menunjukkan seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Secara umum, rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, jika perusahaan dilikuidasi.”

Menurut Sumardi & Suharyono, (2020, 91) mendefinisikan bahwa:

“*Leverage* adalah suatu alat yang sangat penting bagi seorang manager keuangan dalam mengadakan perencanaan laba perusahaan dan dalam kaitannya untuk menentukan pilihan alternatif sumber dana yang paling baik guna membelanjai pertumbuhan modal selaras dengan pertumbuhan perusahaan.”

Menurut (Laihah & Widyasari, 2024) mendefinisikan bahwa:

“Rasio *leverage* merupakan perusahaan besar cenderung memanfaatkan sumber daya daripada menggunakan *leverage*. Perusahaan besar dapat menarik pusat perhatian pemerintah sehingga akan menjadikan manajer perusahaan untuk berlaku patuh. Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak yang besar akan terjadi utang yang besar pula, maka dari itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak. laba kena pajak dari perusahaan yang menjadikan utang sebagai sumber pendanaan relatif lebih kecil dibandingkan dengan sumber pendanaan yang berasal dari penerbit saham”.

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan diatas maka penulis

menyimpulkan bahwa *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kebutuhan perusahaan dapat dibiayai dengan utangnya. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat *leverage* semakin besar risiko hutang yang dihadapi perusahaan. Penggunaan utang (*leverage*) yang terlalu tinggi akan berdampak buruk bagi perusahaan karena masuk dalam kategori utang ekstrem. Dimana perusahaan terjebak dalam utang yang tinggi sehingga kesulitan untuk melepas beban hutang. *Leverage* dipilih sebagai variabel dalam penelitian ini karena untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban aktiva yang dimiliki, sebab investor akan melihat *leverage* perusahaan dalam menentukan keputusan investasi perusahaan.

Menurut Anggraeni et al., (2024, 79) ada tiga jenis *leverage* yaitu sebagai berikut:

1. *Leverage* Operasi (*Operating Leverage*)

Leverage operasi melibatkan pemanfaatan aset dengan biaya tetap, dengan harapan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan aset tersebut akan mencukupi untuk menutup biaya tetap dan variabel. Dengan kata lain, ini merupakan cara untuk mengukur risiko usaha suatu perusahaan. *Leverage* operasi dimanfaatkan untuk mengukur dampak sejauh mana perubahan tertentu dalam volume penjualan mempengaruhi laba operasi bersih penjualan. Penggunaan *leverage* operasi diharapkan mampu menjadi pengaruh pada penjualan serta menciptakan keuangan sebelum pajak serta bunga yang lebih tinggi. Adapun besar kecilnya

leverage operasi dinilai melalui DOL (*Degree of Operating Leverage*)

dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DOL} = \frac{\% \text{ Perubahan EBIT}}{\% \text{ Perubahan Penjualan}}$$

Sumber: Anggraeni et al., (2024, 79)

2. *Leverage* Keuangan (*Financial Leverage*)

Leverage Keuangan melibatkan pemanfaatan dana yang memiliki beban tetap dengan tujuan untuk meningkatkan *Earning Per Share* (EPS). Ini merupakan ukuran yang mencerminkan seberapa besar sekuritas dengan pendapatan tetap dimanfaatkan dalam struktur modal perusahaan. *Degree of Financial Leverage* (DFL) menggambarkan persentase perubahan EPS sebagai hasil dari persentase perubahan laba sebelum bunga dan pajak. Berikut rumus DFL dibawah ini :

$$\text{DFL} = \frac{\% \text{ Perubahan EPS}}{\% \text{ Perubahan EBIT}}$$

Sumber: Anggraeni et al., (2024, 79)

3. *Leverage* total merupakan gabungan dari *leverage* keuangan yang dimanfaatkan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan pemegang saham biasa. *Degree of Combined Leverage* (DCL) mengukur persentase perubahan EPS sebagai akibat persentase perubahan penjualan. Resiko total mencakup variabilitas yang dimanfaatkan untuk menilai resiko bisnis dan resiko keuangan perusahaan. Apabila DCL tinggi memperlihatkan bahwa resiko perusahaan secara keseluruhan juga

tinggi, sehingga investor dapat memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi. DCL dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DCL} = \frac{\% \text{ Perubahan EPS}}{\% \text{ Perubahan Penjualan}} = \text{DOL} \times \text{DFL}$$

Sumber: Anggraeni et al., (2024, 79).

Menurut Siswanto, (2021, 28) ada tiga cara dalam pengukuran analisis rasio *leverage* sebagai berikut:

1. *Debt to Asset Ratio* digunakan untuk mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. *Debt Ratio* menunjukkan besarnya risiko keuangan. Semakin tinggi nilai DAR, semakin beresiko suatu perusahaan dari sisi keuangannya. Berikut rumus perhitungan DAR:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

Sumber: Siswanto, (2021, 28)

2. *Debt to Equity Ratio* digunakan untuk menunjukkan proporsi ekuitas dalam menjamin hutang total. DER juga menunjukkan besarnya risiko keuangan. Semakin tinggi nilai DER semakin tinggi risiko perusahaan mengalami kebangkrutan.

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

Sumber: Siswanto, (2021, 28)

3. *Long-term Debt to Equity Ratio* digunakan untuk mengukur besar kecilnya penggunaan utang jangka panjang dibandingkan modal sendiri. LDER juga menunjukkan besarnya risiko keuangan suatu perusahaan.

$$\text{LDER} = \frac{\text{LTD}}{\text{Total Equity}}$$

Sumber: Siswanto, (2021, 28)

4. *Time Interest Earned Ratio* digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan EBIT yang dimiliki.

$$\text{TIER} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Interest}}$$

Sumber: Siswanto, (2021, 28)

5. *Cash Coverage Ratio* digunakan untuk menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan EBIT + Depresiasi.

$$\text{CCR} = \frac{\text{EBIT} + \text{Depresiasi}}{\text{Interest}}$$

Sumber: Siswanto, (2021, 28)

4. *Capital Intensity*

Capital Intensity juga merupakan faktor determinan dalam praktik penghindaran pajak. perusahaan melakukan investasi dengan tujuan utama

untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan usahanya. Berikut definisi

Capital Intensity sebagai berikut:

Menurut Wiley, (2021) dalam buku (Goh & Erika 2022, 46) mendefinisikan bahwa:

“*Capital Intensity* merupakan kebalikan dari rasio perputaran total aset. Semakin tinggi rasio, semakin besar kebutuhan modal perusahaan untuk menghasilkan penjualan yang berarti semakin tinggi intensitas modal perusahaan. Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi cenderung lebih berisiko dibandingkan dengan perusahaan yang lebih sedikit menggunakan aset tetap. Tingginya intensitas modal biasanya terkait dengan besarnya aset tetap yang dimiliki. Jika terjadi penurunan penjualan, laba perusahaan dengan biaya tetap tinggi akan menurun secara signifikan, karena biaya tetap tersebut tidak dapat dikurangi dalam jangka pendek”.

Menurut (Pramesti et al., 2022) mendefinisikan bahwa:

“*Capital Intensity* merupakan aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari adanya penyusutan dari aset tetap setiap tahunnya. Biaya penyusutan dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk mengurangi pajak yang dibayar perusahaan karena biaya penyusutan akan secara langsung mengurangi laba yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki biaya penyusutan yang tinggi sehingga tingkat pajak yang harus dibayar oleh perusahaan akan semakin rendah.”

Menurut (Syafriзал & Sugiyanto, 2022) mendefinisikan bahwa:

“*Capital Intensity* atau intensitas modal merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan investasi pada aset tetap. Rasio intensitas modal dapat menggambarkan seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Dengan bertambahnya aset tetap perusahaan, produktivitasnya akan meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan laba perusahaan”.

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa *capital intensity* atau intensitas modal merupakan gambaran seberapa besar perusahaan dalam menginvestasi asetnya ke dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Kepemilikan aset akan mempengaruhi pada pengurangan pembayaran pajak sehingga langkah ini yang menjadi alasan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Ada tiga intensitas untuk mengukur komposisi aset, yaitu intensitas modal, persediaan, dan penelitian maupun pengembangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus *Capital Intensity Ratio* sebagai berikut:

$$\text{CIR} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber: (Pramesti et al., 2022)

5. *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak sebagai bentuk perencanaan pajak supaya terhindar dari beban pajak yang harus dibayarkan berdasarkan undang-undang dalam perpajakan dengan menggunakan *grey area*. Penghindaran pajak kini menjadi fokus utama di hampir semua negara. Praktik *tax avoidance* terutama terjadi dalam transaksi bisnis internasional yang melibatkan perusahaan-perusahaan dengan hubungan afiliasi atau khusus.

Menurut Mappadang, (2021, 32) mendefinisikan bahwa:

“*Tax Avoidance* umumnya dipahami sebagai upaya untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara memanfaatkan celah atau kekurangan dalam peraturan perpajakan suatu negara guna meminimalkan beban pajak.”

Menurut Suhendra, (2024, 151) mendefinisikan bahwa:

“*Tax Avoidance* adalah penghindaran pajak dengan menggunakan metode hukum (legal) untuk mengurangi status keuangan individu untuk menurunkan jumlah pajak, terutama pendapatan pajak yang harus dibayar.”

Menurut (Zalzabilla & Marpaung, 2024) mendefinisikan bahwa:

“*Tax Avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang sah guna mengurangi jumlah pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, sehingga mengurangi kewajiban pajak. meskipun tindakan ini legal, pemerintah cenderung tidak menyukainya karena dapat mengurangi pendapatan negara.”

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa *tax avoidance* adalah tindakan yang secara umum dianggap tidak dapat diterima dan harus dicegah. hal ini terjadi karena pengecualian pajak dilakukan dengan menggunakan celah dalam peraturan pajak secara literal tidak melanggar hukum.

Rekayasa atau *tax affairs* dalam bingkai aturan perpajakan merupakan penghindaran pajak. Hal ini dimaksudkan untuk mematuhi aturan dan memiliki sifat legal karena diizinkan oleh peraturan pajak. walaupun praktik ini berdampak pada penerimaan pajak, pemerintah tidak dapat menuntut secara hukum. Tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, wajib pajak melakukan berbagai upaya untuk memperkecil utang pajak, jika tidak menghapusnya sama sekali, dan untuk memaksimalkan aliran kas. Tidak ada pelanggaran hukum. Sebaliknya, mereka dapat menghemat pajak

dengan menghindari aplikasi pengenaan pajak dengan mengontrol fakta-fakta, yang memungkinkan untuk menghindari besarnya pengenaan pajak yang bahkan tidak terkena pajak. Karena mereka merasakan keberatan untuk membayar pajak (Wansu & Dura, 2024).

Pajak dianggap sebagai beban atau transfer kekayaan dari perusahaan kepada pemerintah, maka karena itu keinginan untuk meminimalisasi pajak menimbulkan perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Sebenarnya yang membedakan *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah dari sisi legalitasnya. *Tax Avoidance* memiliki sifat legal atau diperbolehkan secara hukum sedangkan *Tax Evasion* memiliki sifat ilegal atau tidak diperbolehkan secara hukum. Belum adanya cara relevan yang dapat diandalkan untuk melawan penghindaran dan penggelapan pajak maka timbulah berbagai kasus-kasus *tax avoidance*. Berikut dibawah ini kasus-kasus *tax avoidance*:

Informasi dari direktorat jendral pajak kementerian keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang ditangani kantor wilayah (Kanwil) pajak khusus tidak membayar PPh badan pasal 25 dan 29 selama 10 tahun karena alasan merugi terus menerus namun perusahaannya masih eksis. Sementara pajak lainnya, untuk PPh Final dan PPh 21 mereka melakukan pembayaran. Praktik ini dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari indonesia kenegara lain. Di Amerika pun terdapat paling tidak seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan *tax*

avoidance yakni membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yang dibayarkan perusahaan mendekati 30% Mappadang, (2021, 17).

Beberapa kasus *tax avoidance* lainnya terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel II. 1

Daftar Kasus Tax Avoidance

No	Kasus	Kejadian
1	Google	Google telah menerapkan strategi penghindaran pajak yang cukup canggih di Indonesia. Mereka memanfaatkan peraturan yang mengharuskan suatu perusahaan memiliki “keberadaan fisik” yang signifikan disuatu negara untuk dikenakan pajak atas pendapatan yang dihasilkan di negara tersebut. Dengan mendirikan anak perusahaan di Singapura dan hanya memiliki kantor perwakilan pemasaran di Indonesia, google berhasil menghindari status sebagai Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Akibatnya, pemerintah Indonesia kesulitan untuk mengenakan pajak atas pendapatan yang dihasilkan dari operasi bisnis google di Indonesia, karena google beragumen bahwa mereka hanya melakukan kegiatan pemasaran dan tidak menjalankan bisnis inti di Indonesia.
2	Panama Papers	Investigasi yang dilakukan oleh <i>International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)</i> mengungkap adanya praktik yang luas di kalangan para pejabat, politisi, dan individu superkaya yang menggunakan perusahaan cangkang di negara-negara surga pajak untuk menyembunyikan kekayaan mereka. Perusahaan-perusahaan <i>offshore</i> ini yang seringkali berfungsi sebagai <i>Special Purpose Vehicle (SPV)</i> , digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari penghimpunan modal hingga akuisisi perusahaan. Negara-negara seperti Cayman Islands, British Virgin Islands, dan Panama, dengan kerahasiaan keuangan yang ketat dan tidak mewajibkan pengungkapan pemilik sebenarnya, menjadi destinasi yang sangat populer bagi mereka yang ingin melindungi asetnya dari pengawasan publik.

3	Google, Apple, Amazone dan 350 Perusahaan Multinasional lainnya	Perusahaan-perusahaan besar seringkali mengalihkan keuntungan mereka ke negara-negara dengan tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan nol, yang dikenal sebagai negara surga pajak. dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan internasional, seperti skema “Double Irish Dutch Sandwich”, perusahaan-perusahaan ini dapat mengurangi secara signifikan kewajiban pajak mereka. Praktik ini, meskipun legal, sering kali dianggap tidak etis karena bertentangan dengan prinsip dasar perpajakan, yaitu pajak harus dibayar di negara tempat pendapatan dihasilkan. Kebocoran dokumen “Luxembourg Leaks” telah mengungkap secara luas praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional.
4	Perusahaan-perusahaan besar Indonesia yang memiliki kantor pusat di Singapura padahal sumber penghasilan di Indonesia	Singapura telah berhasil memposisikan dirinya sebagai pusat keuangan regional dengan menawarkan berbagai insentif pajak yang sangat menarik bagi investor asing. Tarif pajak korporasi yang rendah sebesar 17%, ditambah berbagai skema pengurangan pajak untuk perusahaan tertentu seperti perusahaan maritim, membuat Singapura menjadi tujuan investasi yang sangat populer. Selain itu, tidak adanya pajak atas pembayaran bunga dan dividen semakin memperkuat daya tarik Singapura. Akibatnya, banyak pengusaha Indonesia yang memilih untuk menaruh uang mereka di Singapura, menghindari kewajiban pajak yang lebih tinggi di Indonesia.
5	PT Coca Cola Indonesia	Berdasarkan hasil penyelidikan Direktorat Jendral Pajak, PT CCI telah melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara yang sistematis. Perusahaan ini sengaja membengkakkan biaya iklan dengan jumlah yang sangat fantastis, yakni sebesar Rp 566,84 miliar selama periode 2002-2006. Dengan cara ini, CCI berhasil mengurangi jumlah keuntungan yang dilaporkan dan akibatnya mengurangi ijumlah pajak yang harus dibayarkan. Akibat dari tindakan ini negara mengalami kerugian pendapatan pajak sebesar Rp 49,24 miliar.

Sumber: Mappadang, (2021, 18).

Menurut (Mappadang, 2021, 31), praktik *tax avoidance* dilakukan dalam

suatu *tax planning* yang dapat dilakukan dalam beberapa bentuk :

1. *Substantive Tax Planning* yang terdiri dari:
 - a. Memindahkan subjek pajak ke negara yang dianggap memiliki perlakuan khusus terhadap jenis penghasilan tertentu.
 - b. Memindahkan objek pajak ke negara yang dianggap memiliki perlakuan pajak khusus untuk jenis penghasilan tertentu.
 - c. Memindahkan subjek pajak dan objek pajak ke negara yang termasuk dalam kategori memberi perlakuan khusus terhadap suatu jenis penghasilan.

2. *Formal Tax Planning*

Melakukan penghindaran pajak dengan cara mempertahankan tujuan ekonomi suatu transaksi, namun mengubah bentuk hukumnya agar beban pajak menjadi lebih rendah.

Menurut (Mappadang, 2021, 33), komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter *tax avoidance* sebagai berikut:

1. Ditemukan adanya manipulasi transaksi yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tujuan utama dari manipulasi ini adalah untuk menghindari kewajiban perpajakan.
2. Skema ini seringkali mengeksploitasi kelemahan dalam undang-undang atau menerapkan ketentuan hukum secara kreatif untuk tujuan yang tidak sesuai dengan maksud semula dari peraturan tersebut.

3. Kerahasiaan merupakan bagian integral dari skema penghindaran pajak ini. Para konsultan biasanya akan memberikan informasi atau strategi penghindaran pajak dengan syarat informasi tersebut tidak disebarluaskan.

Menurut Mappadang, (2021, 35) Jenis-jenis *Tax Avoidance* berdasarkan aturan hukum adalah sebagai berikut:

1. *Tax Avoidance* yang diperbolehkan

Acceptable Tax Avoidance adalah tindakan penghindaran pajak yang sah secara hukum, dimana wajib pajak melakukan transaksi yang memiliki tujuan bisnis yang jelas dan tidak melibatkan rekayasa transaksi.

Acceptable tax avoidance memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Memiliki tujuan bisnis yang jelas
- Bukan semata-mata bertujuan untuk menghindari pajak
- Tidak melibatkan manipulasi transaksi

2. *Tax Avoidance* yang tidak diperbolehkan

Unacceptable Tax Avoidance adalah tindakan penghindaran pajak yang tidak dapat diterima secara hukum, yang dicirikan oleh adanya niat untuk menghindari pajak dengan segala cara, termasuk dengan melakukan rekayasa transaksi yang bertujuan untuk menciptakan kerugian atau biaya yang tidak sebenarnya.

Unacceptable Tax Avoidance memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Tindakan ini dicirikan oleh tidak adanya tujuan bisnis yang jelas

- Semata-mata bertujuan untuk menghindari pajak
- Melibatkan manipulasi transaksi untuk menciptakan biaya atau kerugian yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Perbedaan antara keduanya muncul dari motivasi wajib pajak, atau apakah terdapat moral hazard dari wajib pajak. Oleh karena itu, *tax avoidance* bisa dianggap sebagai kegiatan yang legal atau juga dapat dikategorikan sebagai kegiatan ilegal.

Dengan melakukan penghindaran pajak, perusahaan dapat meningkatkan likuiditasnya. Namun, tindakan ini juga disertai dengan risiko biaya yang tinggi, baik itu biaya yang timbul akibat perubahan peraturan perpajakan maupun biaya yang terkait dengan kompleksitas perencanaan pajak. Penghindaran pajak mampu dihitung dengan memakai rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu sebuah rasio antara pajak yang dibuat oleh perusahaan dari keuntungan perusahaan sebelum pajak. Apabila CETR mengalami peningkatan maka *tax avoidance* menurun, begitu pula sebaliknya. Rumus yang dipakai untuk melakukan pengukuran pada CETR. Berikut rumus yang digunakan dalam perhitungan *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Sumber: Suhendra, (2024, 157)

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibangun di atas fondasi penelitian-penelitian terdahulu yang

memiliki kesamaan dalam hal variabel penelitian. Berikut adalah tabel yang merangkum penelitian-penelitian tersebut:

Tabel II. 2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	(Arieska & Samara, 2024)	Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Intensitas Modal terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	X1: Transaksi Hubungan Istimewa X2: Ukuran Perusahaan X3: Profitabilitas X4: Intensitas Modal Y: <i>Tax Avoidance</i>	Transaksi Hubungan Istimewa berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> Profitabilitas berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> Intensitas Modal berpengaruh secara negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
2.	(Claudia & Sulistiyo wati, 2024)	Pengaruh Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , dan Komite Audit	X1: Komisaris Independen X2: <i>Leverage</i> X3: Komite Audit	Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>

		terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Industrial Goods Yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022).	Y: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> tidak memiliki dampak terhadap <i>Tax Avoidance</i> Komite Audit memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3	(Anggriani & Purwanti, 2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak.	X1: Profitabilitas X2: <i>Capital Intensity</i> X3: <i>Inventory Intensity</i> X4: <i>Leverage</i> Y: Penghindaran Pajak	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak <i>Inventory Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
4	(Arkana & Widijoko, 2023)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Likuiditas,	X1: <i>Leverage</i> X2: Profitabilitas X3: Likuiditas X4: <i>Capital</i>	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

		dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak.	<i>Intensity</i> Y: Penghindaran Pajak	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
5	(Irawati et al., 2020)	Analisis Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak.	X1: Profitabilitas X2: <i>Leverage</i> X3: Pertumbuhan Penjualan X4: Kepemilikan Keluarga Y: Penghindaran Pajak	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Kepemilikan Keluarga tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

6	(Jao & Holly, 2022)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Penghindaran Pajak.	X1: Profitabilitas X2: Likuiditas X3: <i>Leverage</i> X4: Ukuran Perusahaan X5: <i>Corporate Social Responsibility</i> Y: Penghindaran Pajak	Profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak Likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak <i>Leverage</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak <i>Corporate Social Responsibility</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
7	(Nursanti & Modding, 2023)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	X1: Ukuran Perusahaan X2: <i>Leverage</i> X3: Profitabilitas Y: <i>Tax Avoidance</i>	Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap

				<i>Tax Avoidance</i> Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
8	(Prabowo & Sahlan, 2022)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverge</i> , dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel.	X1: Profitabilitas X2: <i>Leverage</i> X3: <i>Capital Intensity</i> Y: Penghindaran Pajak	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.
9	(Prihatini & Amin, 2022)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kualitas Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	X1: Profitabilitas X2: <i>Leverage</i> X3: Ukuran Perusahaan X4: Intensitas Aset Tetap X5: Kualitas Audit Y: <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> Intensitas Aset Tetap

				berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
10	(Setyaning et al., 2023)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	X1: Profitabilitas X2: <i>Leverage</i> X3: <i>Capital Intensity</i> Y: <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
11	(Khoirun nisa Heriana et al., 2023)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	X1: <i>Corporate Social Responsibility</i> X2: Ukuran Perusahaan X3: <i>Capital Intensity</i> Y: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

				terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
12	(Khasana h & Indriyani, 2021)	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Likuiditas</i> , dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan komite audit sebagai variabel moderating.	X1: <i>Leverage</i> X2: <i>Likuiditas</i> X3: <i>Capital Intensity</i> Y: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> <i>Likuiditas</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
13	(Lukito & Sandra, 2021)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Profitabilitas</i> , dan <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	X1: <i>Capital Intensity</i> X2: <i>Profitabilitas</i> X3: <i>Financial Distress</i> Y: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> <i>Profitabilitas</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> <i>Financial Distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
14	(Pasaribu	Pengaruh	X1: <i>Leverage</i>	<i>Leverage</i> tidak

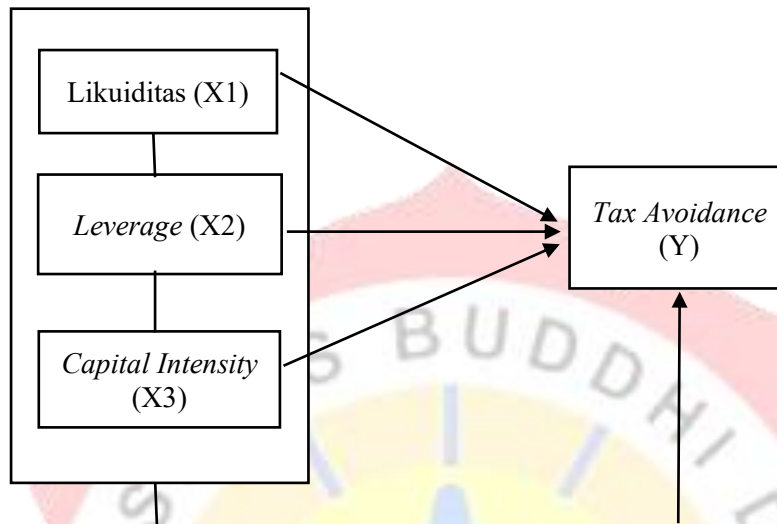
	& Mulyani, 2019)	<i>Leverage</i> dan <i>Liquidity</i> terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> dengan <i>Inventory</i> <i>Intensity</i> sebagai variabel moderasi.	X2: <i>Liquidity</i> Y: <i>Tax Avoidance</i>	berpengaruh terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> <i>Liquidity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> .
15	(Sumantri & Kurniawati, 2019)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan <i>Capital</i> <i>Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Properti dan <i>Real Estate</i> yang terdaftar dari BEI 2019- 2021.	X1: Profitabilitas X2: Likuiditas X3: <i>Leverage</i> X4: <i>Capital</i> <i>Intensity</i> Y: Penghindaran Pajak	Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> Likuiditas berpengaruh terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> <i>capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> .

Sumber: diolah oleh peneliti.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas, maka model kerangka

penelitian yang digunakan untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: diolah oleh peneliti.

Gambar II. 1

Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- X1 : Likuiditas
- X2 : *Leverage*
- X3 : *Capital Intensity*
- Y : *Tax Avoidance*

D. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh *Likuiditas* terhadap *Tax Avoidance*

Nilai likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi utang. Utang yang besar akan beriringan dengan beban bunga yang besar juga, sehingga akan berdampak pada perolehan laba perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menurut

(Azlia, 2023) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dari uraian diatas, maka ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁: Likuiditas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

H₀₁: Likuiditas tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang digunakan sebagai sumber pendanaan. Hubungan antara utang dan laba bersifat negatif, dimana peningkatan utang akan meningkatkan beban bunga dan mengurangi laba. Sementara itu, terdapat hubungan positif antara laba dan pajak, artinya semakin tinggi laba maka semakin besar kewajiban pajak. Hasil penelitian terdahulu menurut (Pratiwi et al., 2020) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dari uraian diatas, maka ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

H₀₂: *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

3. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Semakin banyak aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin besar pula beban depresiasi yang harus ditanggung. Beban depresiasi ini berperan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi cenderung memiliki peluang lebih kecil untuk melakukan praktik penghindaran pajak. adanya preferensi pajak terhadap aset tetap, yang memungkinkan pengakuan

bebas depresiasi, membuat perusahaan dengan banyak aset tetap dapat memanfaatkan insentif pajak ini untuk mengurangi beban pajaknya. Hasil penelitian terdahulu menurut (Setyaningsih et al., 2023) menunjukkan bahwa *capital intensity* dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dari uraian diatas, maka ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₃: *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

H₀₃: *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

4. Pengaruh *Likuiditas, Leverage, dan Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut (Sumantri & Kurniawati, 2019) mendeskripsikan likuiditas sebagai daya perusahaan buat melengkapi peranan kewajiban dalam waktu pendek dengan cara konvensional, waktu pendek diduga rentang waktu sampai satu tahun walaupun dihubungkan dengan operasional perusahaan. Bila perusahaan mempunyai tingkat likuiditas tinggi bisa digambarkan kalau arus kas dari perusahaan itu berjalan dengan bagus sebab dapat melengkapi peranan waktu pendek. Setelah itu *leverage* dipakai untuk menganalisa serta menafsirkan posisi finansial waktu pendek.

Perbandingan utang dihitung dengan membandingkan keseluruhan utang dengan keseluruhan aktiva. Bobot bunga yang ditimbulkan dengan hutang akan mempengaruhi pajak perusahaan. Semakin tinggi angka perbandingan utang sehingga akan semakin turun tingkat bayaran pajak efisien perusahaan. Sedemikian itu pula dengan *capital intensity* bagi meminimalkan bobot pajak perusahaan salah satunya dengan metode

melaksanakan penurunan bobot dana yang bisa dikurangkan dengan keuntungan perusahaan dengan menerapkan aturan perpajakan dalam perundang-undangan. Perolehan salah satu adalah *capital intensity* dimana perusahaan memakai jumlah aktiva yang dipunya buat dipakai pada dana depresiasinya sebagai pengurang pajak dalam keuntungan perusahaan. Sehingga pajak yang dibayarkan akan menjadi lebih kecil. Hasil penelitian terdahulu menurut (Sumantri & Kurniawati, 2019) menunjukkan bahwa likuiditas, *leverage*, dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dari uraian diatas, maka ditarik hipotesis sebagai berikut:

H4: Likuiditas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* berpengaruh positif secara simultan terhadap *Tax Avoidance*.

H04: Likuiditas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* tidak berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mendapatkan data secara ilmiah dalam mendukung penulisan sebuah karya ilmiah. Namun, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti harus mampu mendesain penelitian yang cocok dengan objek yang diteliti dan pendekatan yang digunakan (Nugraha et al., 2024, 16).

Metode penelitian merupakan gambaran tahapan yang akan dilalui seorang peneliti dalam mendapatkan data yang diinginkan dan menarik sebuah kesimpulan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dimana berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Metode ini disebut dengan metode ilmiah karena metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah, ilmu-ilmu, yaitu konkret, empiris, objektif, struktur, dan sistematis (Nugraha et al., 2024, 23).

B. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor, atau ukuran yang berbeda. Dengan kata lain objek penelitian ini menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap

perlu (Albar & Kulsum, 2021, 57).

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam subsektor *Food and Beverage* periode 2020-2023. Faktor-faktor yang diuji pengaruhnya terhadap Penghindaran Pajak tersebut terdiri dari tiga variabel bebas yaitu Likuiditas, *Leverage*, dan *Capital Intensity*.

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi kemudian menjualnya kepada pihak lain. Dalam JASICA (*Jakarta Stock Industrial Classification*), perusahaan yang terdaftar di BEI diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yang terdiri dari sembilan sektor utama. Perusahaan manufaktur terdiri dari tiga sektor utama yaitu *Basic Industry and Chemical* (industri dasar dan kimia), *Miscellaneous Industri* (Aneka Industri), dan *Consumer Goods Industry* (Industri Barang dan Konsumsi). Perusahaan manufaktur yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah subsektor *food and beverage*.

C. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan keterangan ataupun informasi dalam bentuk angka maupun kategori yang berasal dari variabel yang diamati, dihitung dan diukur yang dapat menggambarkan masalah. Dengan demikian, data dapat dalam bentuk angka maupun kategori. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung (Taqwin et al., 2022, 63).

Berdasarkan sumbernya, mendefinisikan bahwa jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau data yang didapatkan dari sumber lain baik organisasi, lembaga, badan, dan institusi yang telah tersedia untuk digunakan sesuai dengan keperluan yang membutuhkan data. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang sehubungan dengan Likuiditas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan sumber data yang diambil untuk sampel dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan *food and beverage* yang mempublikasikan laporan keuangan perusahaannya dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id, *website* resmi perusahaan dan www.idnfinancials.com.

D. Populasi dan Sampel

Populasi merujuk pada kelompok atau area yang menjadi dasar generalisasi, yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2023 (Masita et al., 2022, 79).

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik, kondisi, atau objek yang akan diteliti. Penentuan pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi

untuk dipilih menjadi anggota sampel menurut Sugiyono dalam buku (Masita et al., 2022, 82).

Dalam proses pengambilan sampel, peneliti mempertimbangkan ketersediaan data yang diperlukan untuk diolah dalam penelitian dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2023.
2. Perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang selalu mempublikasikan laporan keuangan tahunan ke Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020-2023.
3. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama periode penelitian, yaitu selama tahun 2020–2023. Hal ini karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak memiliki kewajiban membayar pajak, sehingga tidak relevan dengan motivasi pajak yang dimunculkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu perusahaan yang mengalami kerugian dikeluarkan dari sampel.
4. Perusahaan sampel yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah selama periode tahun 2020–2023.
5. Perusahaan sampel yang memberikan deviden secara berturut-turut selama periode 2020-2023.

Tabel III. 1

Penentuan Jumlah Sampel Penelitian

Kriterian <i>Purposive Sampling</i>	Jumlah
1. Perusahaan manufaktur subsektor <i>food and beverage</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 – 2023.	100
2. Perusahaan manufaktur subsektor <i>food and beverage</i> yang tidak selalu mempublikasikan laporan keuangan tahunan ke Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020 – 2023.	(38)
3. Perusahaan sampel yang mengalami kerugian selama periode 2020 – 2023.	(26)
4. Perusahaan sampel yang tidak menyajikan laporan keuangan dan laporan tahunan menggunakan mata uang rupiah selama periode 2020-2023.	(3)
5. Perusahaan yang tidak membagikan deviden secara berturut-turut selama periode 2020-2023.	(8)
Jumlah Sampel yang memenuhi Kriteria	25
Data Outlier	(12)
Jumlah Tahun Sampel (2020-2023)	4
Jumlah Sampel Perusahaan yang digunakan	52

Sumber: data sekunder dari web idx.co.id yang diolah oleh penulis, 2024.

Berdasarkan pada tabel 3.1 diatas, diketahui bahwa perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 13 perusahaan. Nama bank kode emiten perusahaan-perusahaan yang diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel III. 2
Daftar Nama Perusahaan

NO	Kode Emiten	Nama Emiten
1	CLEO	PT. Sariguna Primatirta Tbk
2	CPIN	PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk
3	GOOD	PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
4	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
5	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
6	JPFA	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk
7	KEJU	PT. Mulia Boga Raya Tbk
8	LSIP	PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk
9	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
10	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk
11	SSMS	PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk
12	SKLT	PT. Sekar Laut Tbk
13	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk

Sumber: diolah oleh peneliti, 2024.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dokumentasi, dimana peneliti menggunakan dua metode untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Metode pertama adalah mengumpulkan laporan keuangan perusahaan yang diteliti dari situs website dan situs perusahaan. Metode kedua adalah studi pustaka yang mencakup jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya. Sehingga penulis mengharapkan dapat meningkatkan akurasi agar hasilnya menjadi lebih bermanfaat.

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel penelitian mendefinisikan bahwa variabel penelitian ditentukan oleh landasan teoritisnya dan kejelasannya ditegaskan

oleh hipotesis penelitian. Oleh karena itu apabila landasan teoritis suatu penelitian berbeda, akan berbeda pula variabelnya (Narbuko & Achmadi, 2023, 118).

1. Variabel Independen

Variabel independen adalah kondisi atau karakteristik yang oleh peneliti dimanipulasi dalam rangka untuk menerangkan hubungannya dengan fenomena yang diobservasi. Karena fungsi variabel ini sering disebut variabel pengaruh, sebab berfungsi mempengaruhi variabel lain, jadi secara bebas berpengaruh terhadap variabel lain (Narbuko & Achmadi, 2023, 119).

Instrumen pengukuran masing – masing variabel independen adalah sebagai berikut:

1. Likuiditas (X1)

Likuiditas adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (utang). Artinya, ketika perusahaan ditagih, perusahaan tersebut harus mampu membayar utangnya, terutama yang sudah jatuh tempo. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya yang telah jatuh tempo, baik terhadap pihak eksternal (likuiditas badan usaha) maupun internal (likuiditas perusahaan). Dalam penelitian ini, likuiditas diukur menggunakan rasio lancar (*current ratio*), yang merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka

pendek atau utang yang akan segera jatuh tempo pada saat ditagih (Kasmir, 2019, 129).

$$\text{Rasio Lancar (CR)} = \frac{\text{Aktiva lancar (Current Assets)}}{\text{Utang lancar (Current liabilities)}}$$

Sumber: (Kasmir, 2019, 135).

2. Leverage (X2)

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan membiayai asetnya dengan utang. Ini menunjukkan seberapa besar beban utang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Secara umum, rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan dilikuidasi. Dalam penelitian ini, *leverage* diukur menggunakan *debt to asset ratio* (rasio utang terhadap aset), yang mengukur perbandingan antara total utang dan total aset. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang dan sejauh mana utang mempengaruhi pengelolaan aset perusahaan.

$$\text{Debt Asset Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

Sumber: (Kasmir, 2019, 158).

3. *Capital Intensity*

Intensitas modal adalah ukuran efisiensi penggunaan aset perusahaan. Semakin tinggi intensitas modal, semakin rendah efisiensi penggunaan asetnya. Perusahaan dengan intensitas modal tinggi cenderung memiliki risiko bisnis yang lebih tinggi karena lebih bergantung pada aset tetap dan memiliki biaya tetap yang besar. Dalam penelitian ini *capital intensity* diproksikan dengan CAPInt, yaitu dimana dalam rasio ini mempunyai gambar rancangan dalam menginvestasikan sebuah aset perusahaan melalui bentuk aset tetap yang dimiliki perusahaan agar berjalan Wiley, 2021 dalam buku (Goh & Erika, 2022, 46).

$$\text{CAPin} = \frac{\text{Total Fixed Assets}}{\text{Total Assets}}$$

Sumber: (Goh & Erika, 2022, 47).

2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah kondisi atau karakteristik yang berubah atau muncul ketika penelitian memperkenalkan, mengubah, atau mengganti variabel bebas. Menurut fungsinya variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain, karena juga sering disebut variabel yang dipengaruhi oleh variabel terpengaruh (Narbuko & Achmadi, 2023, 19). Penelitian ini menggunakan variabel Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen. Instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada

instrument yang digunakan oleh (Yuliatwati & Sutrisno, 2021), dimana Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan namun dilakukan secara etis dan legal, tidak bertentangan dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Tax Avoidance yang disimbolkan dengan (Y) diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). *Effective Tax Rate* (ETR) adalah rasio antara beban pajak perusahaan dan laba sebelum pajak. Penggunaan ETR yang semakin tinggi menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah. Sedangkan ETR yang semakin kecil akan menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin tinggi. Menurut (Yuliatwati & Sutrisno, 2021) *Tax Avoidance* dapat diukur dengan:

$$\text{Effective Tax Ratio (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

Sumber: (Yuliatwati & Sutrisno, 2021).

Tabel III. 3

Operasional Variabel

Variabel	Rumus	Skala	Sumber
Tax Avoidance (Y)	$\text{Effective Tax Ratio (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$	Rasio	(Yuliatwati & Sutrisno, 2021).
Likuiditas (X1)	$\text{Rasio Lancar (CR)} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$	Rasio	(Kasmir, 2019, 135).

<i>Leverage</i> (X2)	<i>Debt to Asset Ratio</i> (DAR) = $\frac{\textit{Total Debt}}{\textit{Total Asset}}$	Rasio	(Kasmir, 2019, 158).
<i>Capital Intensity</i> (X3)	CAPin = $\frac{\textit{Total Fixed Assets}}{\textit{Total Assets}}$	Rasio	(Goh & Erika, 2022, 47).

Sumber: diolah oleh peneliti, 2024.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah analisis statistik, yang umumnya dioperasikan melalui program komputer seperti IBM SPSS Statistics 25. Dalam penelitian kuantitatif, Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan dalam melakukan analisis data pada penelitian, analisis data akan dapat dilakukan apabila seluruh data yang diperlukan sudah didapatkan ataupun diperoleh dengan lengkap, sehingga keakuratan dalam pengambilan kesimpulan sangat ditentukan dari ketepatan serta ketajaman dalam penggunaan alat analisis, karena alasan tersebut maka tentunya bagian dalam proses analisis data merupakan bagian atau proses yang tidak boleh diabaikan atau tidak diperhatikan dalam rangkaian proses penelitian, (Rusmalinda et al., 2024, 98).

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang digunakan, seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi pada masing-masing penelitian. Dengan kata lain, analisis statistik deskriptif menunjukkan gambaran kondisi dan

karakteristik jawaban responden untuk masing-masing variabel yang diteliti (Wahjusaputri & Purwanto, 2022, 202).

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan prasyarat mutlak dalam pelaksanaan analisis regresi linear berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Untuk memastikan bahwa model regresi yang diperoleh merupakan yang terbaik, dalam hal ketepatan estimasi, tidak bias, serta konsisten, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik diantaranya terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas (Syarifuddin & Saudi, 2022, 63).

3. Uji Normalitas

Normalitas data dapat diidentifikasi melalui visualisasi sebaran titik data pada sumbu diagonal grafik atau melalui analisis distribusi frekuensi residual dalam bentuk histogram. Berikut dasar-dasar pengambilan keputusan yaitu:

- Jika data terdistribusi di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut, atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal
- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/ atau tidak mengikuti arah garis tersebut, atau grafik histogram tidak menggambarkan pola distribusi normal.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan jika tidak hati-hati karena secara visual tampak normal, tetapi secara statistik bisa

sebaliknya. Oleh karena itu, uji grafik harus disertai dengan uji statistik. Uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual. Dengan pedoman pengambilan keputusan, (Hermawan, 2020, 29):

- Jika distribusi memiliki sig atau signifikansi, atau nilai probabilitas di bawah 0,05, maka distribusi tersebut tidak normal.
- Jika distribusi memiliki sig atau signifiaksi, atau nilai probabilitas di atas 0,05 maka distribusi tersebut adalah normal.

4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk memeriksa apakah ada korelasi antara variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, akan sulit untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel tersebut terhadap variabel dependen.

Salah satu metode untuk mendeteksi multikolinearitas dalam model regresi adalah dengan memeriksa nilai tolerance dan inversnya, yaitu Variance Inflation Factor (VIF). Kriteria untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2018, 107) adalah:

1. Multikolinearitas ditemukan jika nilai tolerance kurang dari 0,1 dan nilai VIF lebih dari 10.
2. Multikolinearitas tidak terjadi jika nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10.

5. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam varians residual antara pengamatan dalam model regresi. Jika varians residual berbeda antar pengamatan, maka itu disebut heteroskedastisitas, sedangkan jika tetap itu disebut homoskedastisitas. Model regresi yang tidak memenuhi asumsi homoskedastisitas akan menghasilkan estimasi parameter yang tidak efisien dan uji statistik yang tidak valid (Ghozali, 2018, 137), salah satu pendekatan untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas pada model regresi, salah satu metode adalah dengan memeriksa *scatterplot* atau pola khusus pada nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID (sumbu Y) terhadap *residual error* yaitu ZPRED (sumbu X).

Dasar untuk mengambil keputusan dalam uji heteroskedastisitas adalah:

1. Jika titik-titik tersebut membentuk pola garis bergelombang atau pola yang mengalami perluasan dan penyempitan, itu menunjukkan adanya heteroskedastisitas dalam data.
2. Jika titik-titik pada semua lokasi, baik di atas maupun di bawah angka 0, tersebar secara acak tanpa pola yang jelas, maka tidak ada heteroskedastisitas.

6. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi serial pada residual dalam model regresi. Korelasi serial terjadi ketika residual

pada satu pengamatan berkorelasi dengan residual pada pengamatan sebelumnya (Ghozali, 2018, 111). Keberadaan autokorelasi dapat menyebabkan hasil estimasi pada model regresi menjadi tidak efisien dan tidak valid. Oleh karena itu, uji Durbin Watson dilakukan untuk mendeteksi masalah ini. Kriteria uji Durbin Watson sebagai berikut:

1. Jika nilai Durbin-Watson (DW) berada di antara batas atas (du) dan $(4-du)$, maka koefisien autokorelasi dianggap nol, menunjukkan tidak adanya autokorelasi.
2. Jika nilai Durbin-Watson (DW) lebih rendah dari batas bawah (dl), maka koefisien autokorelasi dianggap positif, menunjukkan keberadaan autokorelasi positif.
3. Jika nilai Durbin-Watson (DW) melebihi $(4-dl)$, maka koefisien autokorelasi dianggap negatif, menandakan keberadaan autokorelasi negatif.
4. Jika nilai Durbin-Watson (DW) berada di antara batas atas (du) dan batas bawah (dl), atau berada di antara $(4-du)$ dan $(4-dl)$, maka kesimpulan tidak dapat diambil.

7. Uji Statistik

a. Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda sering dipakai dalam penelitian yang melibatkan banyak variabel independen. Analisis regresi membantu memahami bagaimana hubungan antara variabel independen dan dependen akan berubah ketika nilai variabel independen naik atau

turun. Selain itu, analisis ini juga digunakan untuk menguji apakah hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat positif atau negatif, yang nantinya informasi ini dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil dari analisis regresi linear berganda akan menilai seberapa pentingnya dampak Likuiditas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak.

Persamaan regresi linier berganda biasanya diungkapkan dalam bentuk rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan tambahan:

Y : Dependen Variabel (*Tax Avoidance*)

a : Konstanta

X1 : Likuiditas

X2 : *Leverage*

X3 : *Capital Intensity*

e : Residual/error

b1, b2, b3 adalah koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar variabel dependen meningkat atau menurun tergantung pada variabel independen.

b. Uji Koefisien Determinasi R²

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk menilai sejauh mana model dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai R² berada dalam rentang 0 hingga 1. Jika R² rendah, ini

mengindikasikan bahwa variabel independen kurang efektif dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen hampir sepenuhnya menjelaskan informasi yang diperlukan untuk memprediksi perubahan pada variabel dependen (Ghozali, 2018, 97).

8. Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara untuk mengetahui kebenaran maka diperlukan pengujian terhadap hipotesis yang ada, hipotesis terdiri dari hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis umumnya diuji secara simultan atau keseluruhan dan dengan cara parsial atau satu persatu, dengan hipotesis sebagai berikut:

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang kita masukkan dalam model punya pengaruh gabungan yang signifikan terhadap variabel yang kita ingin prediksi. Dengan kata lain, uji ini membantu kita menilai apakah model yang kita buat secara keseluruhan itu baik atau tidak

Tingkat signifikansi yang kita gunakan adalah 0,05 atau 5%. Jika nilai signifikansi F kurang dari 5%, maka kita bisa menyimpulkan bahwa semua variabel bebas secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Syarifuddin & Saudi, 2022, 77).

Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut :

- Jika nilai signifikan F kurang dari 0.05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya semua variabel independen/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.
- Jika nilai signifikan F lebih dari 0.05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya semua variabel independen/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

b. Uji Parsial (Uji T)

Uji t merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis nol bahwa koefisien regresi suatu variabel bebas sama dengan nol. Dengan kata lain, uji t bertujuan untuk menguji apakah suatu variabel bebas memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variabilitas variabel terkait. Uji t digunakan untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Nilai t-tabel ditentukan pada tingkat signifikan 5% dan dua sisi dengan derajat kebebasan $(df) = n - k$, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel bebas dan terikat (Sahir, 2021, 52). Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah :

- $H_0 : t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen.

- $H_1 : t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka terdapat pengaruh antara variabel, dependen terhadap variabel independen.

